

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan proses perbaikan kondisi perekonomian negara untuk mencapai standar sosial yang makmur dan sejahtera. Peningkatan kesejahteraan sosial diperlihatkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat pengangguran serta nilai rupiah yang stabil (Warjiyo, 2016). Untuk mencapai kondisi sosial pada standar sejahtera bukanlah suatu perkara yang mudah, ketika perekonomian diserahkan sepenuhnya pada swasta akan menyebabkan kegagalan pasar dan penurunan kualitas kesejahteraan masyarakat. Menurut teori Keynes, untuk mendorong pembangunan ekonomi riil dalam mencapai kemakmuran sosial diperlukan adanya peranan pemerintah (Mankiew, 2007).

Kebijakan pemerintah merupakan cerminan dari peran pemerintah yang dapat dibagi kedalam dua bentuk, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter memiliki satu tujuan tunggal yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah yang dilihat dari nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa dalam negeri (inflasi), dan nilai rupiah terhadap mata uang asing (nilai tukar). Sementara itu, kebijakan fiskal merupakan perubahan anggaran setiap tahun baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah sebagai bentuk pengendalian perekonomian (Rahardja dan Manung, 2001).

Secara umum kebijakan fiskal diartikan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Waluyanto (2009) kesinambungan fiskal merupakan suatu kondisi dimana secara dinamis struktur APBN mampu menjalankan fungsinya sebagai stabilisator perekonomian, serta memiliki kapasitas untuk memenuhi berbagai beban pengeluaran baik secara eksplisit maupun implisit, serta menjaga stabilitas perekonomian untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang. Untuk menjaga kesinambungan fiskal diperlukan adanya konsolidasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan defisit anggaran (Nizar, 2009).

Pada kenyataannya pengendalian defisit anggaran tidaklah mudah, karena kondisi perekonomian selalu mengalami perubahan yang tidak diduga atau mudah terjadinya guncangan dalam perekonomian (Chen dan Liu, 2017).

Ketika defisit anggaran menurun dan tidak mencapai target APBN, maka diindikasikan tidak maksimal dalam mengalokasikan anggaran. Pada saat defisit anggaran yang terus meningkat yang disebabkan oleh ekspansi pengeluaran pemerintah untuk menjalankan program pembangunan, tidak mampu diimbangi oleh penerimaan pemerintah. Kondisi ini mengganggu kesinambungan fiskal.

Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk konsumsi maupun investasi menjadi salah satu unsur yang menyebabkan ketidakstabilan kesinambungan fiskal. Pengeluaran pemerintah cenderung meningkat untuk membiayai berbagai program pembangunan yang dicanangkan setiap tahunnya. Bank Indonesia mencatat realisasi pengeluaran pemerintah tahun 2000 atau paska krisis meningkat dari tahun-tahun sebelumnya menjadi Rp.221.467 milyar, sedangkan penerimaan pemerintah hanya mampu diserap sebesar Rp.205.335 milyar. Besarnya pengeluaran dibandingkan penerimaan menimbulkan defisit anggaran yang meningkat tajam dari tahun sebelumnya, dari Rp.1.999 milyar menjadi Rp.16.132 milyar. Lebih lanjut, defisit anggaran terus meningkat secara nominal pada tahun 2012 sebesar Rp.190.105 milyar hingga tahun 2017 sebesar Rp.397.235 milyar.

Pengeluaran pemerintah berkontribusi besar dalam membangun perekonomian negara paska krisis 1998/1999. Kondisi ini dibuktikan dengan pengeluaran pemerintah yang diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7%. Seiring dengan pengeluaran pemerintah yang ekspansif, dalam rapat Bank Indonesia pada tahun 2014 merumuskan perlu dilakukan reformasi fiskal untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi pembiayaan investasi pemerintah. sejalan dengan rumusan dalam rapat Bank Indonesia, pemerintah aktif mendorong pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Gencarnya pembangunan disertai dengan ekspansi fiskal yang terus meningkat.

Pengeluaran pemerintah yang ekspansif memberikan tanda adanya guncangan (*shock*) pengeluaran pemerintah. Guncangan pengeluaran pemerintah merupakan suatu kondisi dimana adanya pengeluaran yang

mendesak dikarenakan oleh keadaan yang tidak terduga (PP pasal 11, No. 45 tahun 2013). Menurut Chen dan Liu (2017), Cebi dan Culha (2013), Bouakez dan Eykuem (2011) menyatakan bahwa guncangan fiskal merupakan keadaan dimana realisasi anggaran melebihi anggaran yang dicanangkan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga. Berdasarkan data dari kementerian keuangan memperlihatkan bahwa realisasi belanja negara melebihi APBN pada tahun 2008. Selisih realisasi belanja negara terhadap APBN pada tahun 2008 sebesar Rp.131.071 milyar. Guncangan fiskal ini disebabkan oleh adanya krisis keuangan di Amerika Serikat yang baru berdampak pada perekonomian Indonesia pada kuartal IV tahun 2008. Guncangan pengeluaran pemerintah berlanjut pada tahun 2011 dengan selisih realisasi anggaran terhadap APBN sebesar Rp.65.440 milyar. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kebijakan peningkatan belanja pegawai dan transfer ke daerah.

Pengaturan pada pengeluaran pemerintah menjadi hal prioritas untuk dilakukan. Perubahan pengeluaran pemerintah akan berdampak pada beberapa variabel makro ekonomi, salah satunya adalah perubahan harga domestik dan tingkat suku bunga domestik (Mankiew, 2007). Pengeluaran pemerintah yang ekspansif akan meningkatkan harga dalam negeri, kemudian suku bunga domestik akan meningkat seiring dengan tujuan Bank Indonesia, sebaliknya ketika pengeluaran pemerintah kontraktif akan menyebabkan penurunan terhadap harga domestik dan tingkat suku bunga.

Indonesia merupakan negara terbuka yang telah terintegrasi dengan perekonomian global. Indonesia sebagai negara terbuka tidak terlepas dari perdagangan Internasional dan investasi. Ketika harga barang domestik lebih murah maka ekspor neto akan meningkat, kemudian menyebabkan apresiasi nilai tukar. Sebaliknya ketika harga barang domestik meningkat maka ekspor neto mengalami penurunan dan menyebabkan depresiasi nilai tukar (Mankiew, 2007). Nopirin (2000) menyatakan bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Peningkatan suku bunga dalam negeri diatas tingkat suku bunga dunia akan menyebabkan investasi atau aliran modal masuk kedalam negeri akan bertambah (*capital inflow*) sehingga terjadi apresiasi nilai tukar. Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga dalam negeri dibawah suku bunga dunia

maka investasi dalam negeri akan berkurang (*capital outflow*) yang mengakibatkan terjadinya depresiasi nilai tukar. Eliza dan Ismail (2012) membuktikan bahwa suku bunga domestik di Indonesia berpengaruh positif terhadap investasi langsung baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Nilai tukar rill merupakan perbandingan harga relatif barang di dua negara tertentu (Mankiew, 2007). Perhitungan nilai tukar rill dapat dilihat dari nilai tukar rill efektif (REER). REER adalah nilai tukar rill yang diperhitungkan oleh adanya inflasi dan tahun perhitungan tahun tertentu (Warjiyo, 2016). Berdasarkan data Bank International Settlement (BIS) memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2000 hingga 2017 nilai REER rata-rata dibawah 100 atau *undervalue*. Akan tetapi, pada tahun 2010 kuartal II dan III memperlihatkan nilai REER sebesar 100,45 dan 102,27 yang berarti nilainya *over value*. REER yang *over value* menyebabkan terganggunya kinerja ekspor, dimana harga komoditas ekspor menjadi murah dan impor menjadi mahal. Pada tahun 2011 kuartal II dan III REER kembali menunjukkan nilai *over value* sebesar 100,31 dan 100,47. Kondisi ini disebabkan oleh krisis keuangan global yaitu peningkatan krisis utang pemerintah di Eropa yang berdampak pada perekonomian Indonesia.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui dua instrument kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas nilai tukar pada era nilai tukar mengambang bebas (Warjiyo, 2004). Kebijakan moneter saja belum cukup dalam menjaga kestabilan nilai tukar, maka diperlukan bauran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kuncoro dan Sebayang (2013) menyatakan bahwa diperlukan kebijakan fiskal aktif dalam menjaga bauran kebijakan di Indonesia, karena kedua kebijakan saling berhubungan.

Keterkaitan pengeluaran pemerintah dengan nilai tukar menarik untuk dibahas. Karena adanya hubungan yang kontra antara *shock* pengeluaran pemerintah terhadap nilai tukar rill di berbagai negara. Beetsma et al (2008), Benetrix dan Lane (2009 a,b), Galstyan dan Lane (2009), Cebi dan Culha (2013) menemukan bahwa *shock* pengeluaran pemerintah menyebabkan apresiasi nilai tukar rill. Kim dan Roubini (2008), Monacelli dan Perotti (2010), Enders et al

(2011) menemukan bahwa *shock* pengeluaran pemerintah menyebabkan depresiasi nilai tukar rill.

## 1.2. Rumusan Masalah

Peningkatan defisit anggaran akan menyebabkan kestabilan kesinambungan fiskal menjadi menurun dewasa ini. Pengeluaran pemerintah menjadi salah satu komponen yang menyebabkan penurunan kesinambungan fiskal, dimana ekspansi fiskal tidak mampu diimbangi oleh penerimaan negara. Pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi variabel makro, salah satunya adalah nilai tukar. Pengeluaran pemerintah terus meningkat setiap tahun, sedangkan nilai tukar terus mengalami fluktuasi pada era nilai tukar mengambang bebas. Dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah sangat diperlukan di era ini, ketidakstabilan kebijakan moneter dapat menyebabkan capaian kebijakan fiskal akan terganggu, sebaliknya guncangan fiskal akan menyebabkan kinerja kebijakan moneter tidak berjalan dengan lancar. Kemudian, perbedaan hasil penelitian diberbagai negara, membuat Indonesia sebagai negara berkembang sangat menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini akan diangkat masalah pokok yaitu: Bagaimana pengaruh *shock* pengeluaran pemerintah terhadap nilai tukar rill di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan pengaruh *shock* pengeluaran pemerintah terhadap nilai tukar rill Indonesia. Dari hasil yang akan didapatkan, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu:

1. Untuk menambah keilmuan, pemahaman, dan wawasan, serta mengimplementasikannya dibidang ilmu ekonomi terutama dalam mengkaji ilmu moneter dan perdagangan internasional.
2. Penelitian sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan fiskal, serta sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk

menetapkan bauran kebijakan sehingga memberikan dampak positif terhadap nilai tukar rill di Indonesia.

3. Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi serta tambahan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa fakultas ekonomi universitas andalas, terutama jurusan ilmu ekonomi tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap nilai tukar rill serta menjadi rujukan bagi kalangan akademis dan peneliti yang ingin melakukan penelitian berikutnya.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Topik utama penelitian ini adalah Analisis pengaruh konsumsi dan investasi pemerintah terhadap nilai tukar rill di Indonesia dengan menggunakan pendekatan SVAR. Variabel dalam penelitian ini adalah konsumsi pemerintah, investasi pemerintah, GDP, keseimbangan anggaran pemerintah, konsumsi swasta, investasi swasta, tingkat inflasi, net ekspor, nilai tukar rill efektif, dan suku bunga jangka pendek. Penelitian ini menggunakan data kuartalan.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memaparkan secara menyeluruh dari skripsi ini. Dalam memberikan gambaran atas tulisan ini, secara sistematis tulisan ini dibagi menjadi enam bagian atau diuraikan lagi menjadi sub-sub bagian jika diperlukan. Tulisan ini disusun berdasarkan urutan sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pendahuluan terdiri dari enam sub bab yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Tinjauan Literatur**

Dalam bab ini berisi teori – teori dasar atau pendukung yang berkaitan dengan konsumsi pemerintah, investasi pemerintah, GDP, keseimbangan anggaran pemerintah, konsumsi swasta, investasi swasta, tingkat inflasi, net ekspor, nilai tukar rill efektif, dan suku bunga jangka pendek. Kemudian juga ditambah dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. dan selanjutnya disusun sebuah hipotesa dalam penelitian yang merupakan jawaban sementara dari perumusan masalah.



### **BAB III : Kerangka Teori dan Metodologi Penelitian**

Bab ini akan menjelaskan mengenai data dan sumber data, identifikasi variabel, dan metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data dan sumber data yang telah didapatkan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah SVAR (*Struktural Vector Autoregression*). Sebelumnya data akan diolah terlebih dahulu melalui VAR (*Vector Autoregression*) dan VECM (*Vector Error Correction Model*). Dalam bab ini juga akan diuji atas model yang digunakan.

### **BAB IV: Perkembangan kondisi perekonomian Indonesia**

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh mengenai bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah, dan kondisi nilai tukar di Indonesia, serta dilihat dari segi GDP, keseimbangan anggaran pemerintah, konsumsi swasta, investasi swasta, tingkat inflasi, net ekspor, nilai tukar riil efektif, dan suku bunga jangka pendek.

### **BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dan Analisa yang sudah didapatkan dari olahan data. Penjelasan akan dimulai dari uji stationeritas data melalui *unit root test* setiap variabel, uji kointegrasi antar variabel, kausalitas antar variabel, hingga Analisa data dari hasil estimasi VAR, VECM, dan SVAR menggunakan IRF (*Impulse Response Function*) dan FEVD (*Forecast Error Variance Decomposition*).

### **BAB VI: Penutup**

Bab akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti berdasarkan penelitian dan hasil Analisa yang diperoleh dari pengolahan data.

